

ABSTRAK

Seperti pada saat ini banyak kita lihat maraknya kejahatan melalui media social (*Cyberscape*), adapun contoh kejahatan melalui media social seperti penggelapan, penyebaran berita bohong dan penistaan agama, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan sengaja menyebar luaskan kata-kata maupun gambar yang berbaur penodaan/penistaan agama, yang dimaksud dengan penistaan agama adalah perbuatan yang disengaja untuk melukai atau menghina suatu agama atau hal-hal yang menyangkut suatu agama seperti yang terdapat dalam kasus dari terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokok bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sanksi pidana berdasarkan penistaan agama menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi serta transaksi elektronik, (2) untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penistaan agama di Pengadilan Negeri Ungaran.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif analitis dengan jenis data berdasarkan data primer dan data sekunder yang berdasarkan dari hasil wawancara serta kajian peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana berdasarkan penistaan agama menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang tertuang dalam Putusan hakim No.30/Pid.Sus/2018/PnUnr bahwa terdakwa atas nama Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menistakan agama dan hakim menjatuhkan pidana dengan penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penistaan agama pada putusan No.30/Pid.Sus/2018/PnUnr adalah berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam putusan.

Kata Kunci : Pidana, Penistaan Agama, UU ITE, pertimbangan

ABSTRACT

As at this time we see a lot of crime through social media (Cyberscane), there are examples of crimes through social media such as embezzlement. spreading false news and blasphemy of religion, and even many people who do not know are deliberately spreading words and images that are mingled with blasphemy, what is meant by blasphemy is a deliberate act to injure or insult a religion or other matters concerning a religion, as in the case of the defendant Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo who deliberately made public feelings or committed acts which were primarily hostile to the abuse or blasphemy of a religion adhered to in Indonesia. The objectives of this study are (1) to determine the criminal sanctions based on religious blasphemy according to Law Number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions. (2) to find out what the judge considered in the judgment against the perpetrator of blasphemy at the Ungaran District Court.

The research method in this study uses the sociological juridical approach and descriptive analytical research specifications with data types based on primary data and secondary data based on the results of interviews and a study of the Invitation Law and regulations related to the object of research so as to produce a method of data analysis qualitative.

Based on the results of the research, it shows that convictions based on religious blasphemy according to Law Number 19 of 2016 concerning ITE as stated in Judge's Decision No.30 / Pid Sus / 2018 / PaUnr that the defendant on behalf of Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo has been legally and convincingly proven guilty. commits a crime of blasphemy and the judge imposes a sentence of 3 years imprisonment and a fine of Rp. 100,000.00 (one hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment of 3 (three) months. Judges' considerations in ruling against perpetrators of religious blasphemy in Decision No.30 Pid.Sus/2018PnUnr is based on the burdensome and mitigating circumstances contained in the decision.

Keywords: Criminalization, Religious Blasphemy, ITE Law, consideration